

Integrasi Pengawasan Keuangan Internal Daerah Sidoarjo Tahun 2021-2022

Kalyana Larasati ^{1*}, Nimas Bening Pambudi ², Revienda Anita Fitrie ³, Eva Hany Fanida ⁴

^{1, 2, 3, 4, 5} Universitas Negeri Surabaya

* 25040674089@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Urgensi penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas integrasi pengawasan keuangan internal daerah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada periode 2021–2022 sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini mengkaji integrasi pengawasan internal keuangan daerah melalui implementasi Sistem Informasi Keuangan Sidoarjo (SIKSDA) di Kabupaten Sidoarjo pada periode 2021–2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, observasi, dan analisis dokumen. Fokus penelitian diarahkan pada peran sistem informasi keuangan daerah dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan publik, serta fungsi pengawasan internal dalam memastikan bahwa praktik pengelolaan keuangan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIKSDA memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ketertiban pencatatan transaksi, percepatan administrasi keuangan, kemudahan penyusunan laporan keuangan, serta peningkatan aksesibilitas data bagi para pemangku kepentingan. Selain itu, pengawasan internal berperan penting dalam mendeteksi kesalahan administratif, memperkuat akuntabilitas anggaran, dan mendukung proses audit yang lebih efektif. Namun, implementasi sistem masih menghadapi beberapa tantangan, terutama keterbatasan kapasitas sumber daya manusia serta perlunya penguatan infrastruktur teknologi. Implikasi penelitian ini adalah pemerintah daerah perlu mengoptimalkan integrasi sistem informasi keuangan dan pengawasan internal melalui pelatihan yang berkelanjutan, penyempurnaan sistem, serta penguatan mekanisme pengawasan berbasis data. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah serta mendukung pengelolaan keuangan publik yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sebagai kesimpulan, integrasi SIKSDA dan pengawasan internal merupakan strategi penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Sidoarjo.

keywords: *Internal Financial Supervision, SIKSDA, Regional Financial Management, Transparency, Accountability*

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan publik merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berhubungan langsung dengan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik (Nugroho et al., 2023). Keuangan daerah tidak hanya dipahami sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai alat kebijakan pemerintah dalam membiayai pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Rahma et al., 2026). Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip tertib, efisien, ekonomis,

efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pemerintah Republik Indonesia, 2019).

Dalam konteks pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan publik menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan (Astuti et al., 2024). Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola anggaran secara tepat sasaran, menghindari pemborosan, serta memastikan bahwa setiap penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Sofyani et al., 2023; Gaol et al., 2024). Transparansi dalam keuangan publik juga menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan karena ketersediaan informasi keuangan yang andal, relevan, dan tepat waktu dapat membantu masyarakat serta pemangku kepentingan dalam menilai kinerja pemerintah (Pratolo & Jatmiko, 2022; Gaol et al., 2024).

Penguatan tata kelola keuangan daerah juga didukung oleh regulasi teknis yang mengatur pedoman pengelolaan keuangan daerah. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 menjadi salah satu dasar teknis dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam mengatur mekanisme pengelolaan APBD agar berjalan sesuai standar administrasi pemerintahan yang berlaku (Kementerian Dalam Negeri, 2020). Dengan adanya pedoman tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun dan melaksanakan anggaran secara lebih sistematis, terukur, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik (Aini et al., 2026).

Meskipun regulasi mengenai pengelolaan keuangan daerah telah tersedia, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan (Ramadania & Kamal, 2024). Permasalahan yang sering muncul antara lain kesalahan pencatatan administrasi, keterlambatan pelaporan, kurang optimalnya pemanfaatan anggaran, lemahnya integrasi data, serta potensi terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana publik (Dewi, 2022; Marsuni & Kamal, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak cukup hanya mengandalkan aturan formal, tetapi juga membutuhkan dukungan sistem informasi yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, serta pengawasan internal yang berjalan secara konsisten (Ridzal et al., 2022; Theana et al., 2025).

Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu daerah yang memiliki perhatian terhadap penguatan tata kelola keuangan daerah. Dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022, disebutkan bahwa salah satu misi yang berkaitan dengan fungsi BPKAD adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (BPKAD Kabupaten Sidoarjo, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan bukan hanya menjadi kebutuhan administratif, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam membangun pemerintahan yang lebih transparan dan responsif.

Pada periode 2021–2022, pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo masih menunjukkan beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. BPKAD Kabupaten Sidoarjo mengidentifikasi adanya beberapa isu strategis, seperti belum optimalnya pemahaman penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah pada masing-masing perangkat daerah, kurang memadainya kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan dan barang milik daerah, serta belum terintegrasinya sistem penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan manajemen aset (BPKAD Kabupaten Sidoarjo, 2023). Permasalahan tersebut menjadi dasar penting perlunya inovasi sistem pengelolaan keuangan yang mampu memperbaiki proses administrasi, mempercepat pengolahan data, dan memperkuat pengendalian atas penggunaan anggaran daerah.

Salah satu bentuk inovasi digital yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah Sistem Informasi Keuangan Sidoarjo atau SIKSDA. Sistem ini merupakan platform digital yang digunakan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan menyediakan pilihan periode tahun, termasuk periode 2021 dan 2022 (Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 2026). Kehadiran SIKSDA menjadi penting karena sistem informasi keuangan daerah dapat membantu pemerintah dalam melakukan pencatatan, pengolahan, penyimpanan, serta penyajian data keuangan secara lebih terintegrasi. Sistem informasi keuangan daerah juga berperan dalam mendukung penyusunan laporan keuangan yang lebih efisien, akurat, dan tepat waktu (Lotu & Talam, 2022)

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pentingnya sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi berhubungan erat dengan peningkatan kualitas laporan keuangan (Fitriasari, 2024). Penelitian lain juga menunjukkan juga menemukan bahwa implementasi sistem informasi pemerintahan daerah berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Fitriani & Solikhin, 2025). Kedua penelitian tersebut menegaskan bahwa digitalisasi keuangan daerah dapat mempercepat proses pencatatan, meningkatkan ketepatan data, dan mendukung penyusunan laporan keuangan yang lebih akuntabel.

Namun demikian, fokus sebagian besar penelitian sebelumnya masih cenderung menempatkan sistem informasi sebagai variabel teknis yang berdampak pada kualitas laporan keuangan secara umum. Kajian tersebut belum banyak menguraikan bagaimana sistem informasi keuangan daerah digunakan dalam konteks sistem lokal tertentu, terutama pada daerah yang memiliki aplikasi khusus seperti SIKSDA di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, sebagian studi lebih menekankan hubungan antara sistem informasi dan kualitas laporan keuangan, sementara aspek pengawasan internal sebagai instrumen pengendalian atas penggunaan sistem dan data keuangan belum banyak dibahas secara terpadu.

Selain sistem informasi, pengawasan internal juga memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik (Nasir et al., 2025). Pengawasan internal diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan keuangan telah sesuai dengan peraturan, prosedur, dan tujuan organisasi. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP diatur melalui PP Nomor 60 Tahun 2008 sebagai mekanisme pengendalian yang bertujuan memberikan keyakinan memadai terhadap tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Dengan demikian, pengawasan internal menjadi instrumen penting untuk mencegah kesalahan administrasi, mengurangi risiko penyimpangan, dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Integrasi antara sistem informasi dan pengawasan internal dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Penelitian (Ashara & Hidayat 2025). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa sistem informasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Sistem informasi menyediakan data keuangan yang cepat, terstruktur, dan terdokumentasi, sedangkan pengawasan internal memastikan bahwa data dan proses tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, hubungan antara sistem informasi dan pengawasan internal perlu dikaji secara bersamaan agar dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kualitas pengelolaan keuangan publik.

Berdasarkan perbandingan beberapa studi sebelumnya, dapat dilihat adanya gap penelitian. Pertama, penelitian terdahulu lebih banyak membahas pengaruh sistem informasi terhadap

kualitas laporan keuangan secara umum, tetapi belum secara spesifik mengkaji peran SIKSDA sebagai sistem informasi keuangan lokal di Kabupaten Sidoarjo. Kedua, kajian sebelumnya masih terbatas dalam melihat keterkaitan antara sistem informasi dan pengawasan internal sebagai dua komponen yang saling mendukung dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketiga, masih sedikit penelitian yang menempatkan periode 2021–2022 sebagai konteks analisis, padahal periode tersebut penting karena menunjukkan adanya tantangan integrasi sistem, kompetensi sumber daya manusia, dan kebutuhan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo.

Kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Sidoarjo juga dapat dilihat dari hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 (BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, 2022; BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, 2023). Namun demikian, opini WTP tidak berarti bahwa seluruh aspek pengelolaan keuangan telah bebas dari kelemahan. Opini tersebut perlu dilihat sebagai capaian yang tetap harus diikuti dengan perbaikan berkelanjutan, khususnya pada aspek integrasi sistem, kualitas sumber daya manusia, ketepatan data, dan efektivitas pengawasan internal.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengkaji secara spesifik peran Sistem Informasi Keuangan Sidoarjo atau SIKSDA dan pengawasan internal dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik di Kabupaten Sidoarjo pada periode 2021–2022. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti sistem informasi atau kualitas laporan keuangan secara umum, penelitian ini menempatkan SIKSDA sebagai objek kajian lokal yang dikaitkan dengan fungsi pengawasan internal dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat digitalisasi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai bagian dari strategi penguatan tata kelola keuangan publik yang transparan, akuntabel, efisien, dan terintegrasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai peran Sistem Informasi Keuangan Sidoarjo dan pengawasan internal menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana sistem informasi keuangan daerah dan pengawasan internal berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik di Kabupaten Sidoarjo, khususnya pada periode 2021–2022. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian administrasi publik dan tata kelola keuangan daerah, sekaligus memberikan masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta integrasi sistem pengelolaan keuangan publik.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam peran sistem informasi keuangan daerah dan pengawasan internal dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik di Kabupaten Sidoarjo. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti dapat memahami fenomena yang diteliti berdasarkan data, dokumen, literatur ilmiah, serta informasi yang berkaitan dengan penerapan Sistem Informasi Keuangan Sidoarjo (SIKSDA) dan mekanisme pengawasan internal pada periode tahun 2021–2022.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis kasus. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, laporan keuangan daerah, laporan kinerja instansi pemerintah, serta dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik, sistem

informasi keuangan daerah, pengawasan internal, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan. Sementara itu, analisis kasus dilakukan dengan mengkaji penerapan SIKSDA di Kabupaten Sidoarjo sebagai objek penelitian. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem informasi keuangan daerah digunakan dalam mendukung proses pengelolaan keuangan publik serta bagaimana pengawasan internal berperan dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran.

Strategi pencarian literatur dilakukan secara sistematis melalui beberapa sumber, seperti Google Scholar, Garuda, Sinta, DOAJ, website resmi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, *website* BPKAD Kabupaten Sidoarjo, website BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, serta portal regulasi pemerintah. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur meliputi “pengelolaan keuangan daerah”, “sistem informasi keuangan daerah”, “SIKSDA Kabupaten Sidoarjo”, “pengawasan internal pemerintah daerah”, “SPIP”, “akuntabilitas keuangan daerah”, “transparansi keuangan publik”, “kualitas laporan keuangan pemerintah daerah”, dan “digitalisasi pengelolaan keuangan daerah”. Pencarian juga dilakukan dengan kombinasi kata kunci, seperti “sistem informasi keuangan daerah dan akuntabilitas”, “pengawasan internal dan kualitas laporan keuangan”, serta “digitalisasi keuangan daerah dan transparansi publik”.

Rentang tahun publikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2015–2026. Rentang tersebut dipilih agar penelitian memperoleh rujukan yang cukup relevan, baik dari sisi teori, perkembangan regulasi, maupun temuan empiris terbaru. Namun, beberapa regulasi utama yang diterbitkan sebelum tahun 2015 tetap digunakan karena memiliki relevansi langsung dengan topik penelitian, seperti PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dokumen pemerintah yang dianalisis secara khusus difokuskan pada periode 2021–2022 karena sesuai dengan batasan waktu penelitian mengenai pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi: literatur yang membahas pengelolaan keuangan daerah, sistem informasi keuangan daerah, pengawasan internal, SPIP, akuntabilitas, transparansi, atau kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal atau prosiding; dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan Kabupaten Sidoarjo; laporan keuangan daerah dan laporan kinerja instansi pemerintah pada periode 2021–2022; serta regulasi yang relevan dengan pengelolaan keuangan daerah. Adapun kriteria eksklusi meliputi: literatur yang tidak berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan publik atau sistem informasi keuangan daerah; artikel yang tidak tersedia secara lengkap; sumber yang tidak memiliki identitas penulis atau lembaga penerbit yang jelas; publikasi populer yang tidak dapat diverifikasi; serta literatur yang hanya membahas sistem informasi secara umum tanpa kaitan dengan sektor publik atau pemerintahan daerah.

Proses seleksi literatur dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi sumber berdasarkan kata kunci yang telah ditentukan. Tahap kedua adalah penyaringan awal melalui judul dan abstrak untuk menilai kesesuaian literatur dengan fokus penelitian. Tahap ketiga adalah penelaahan isi secara penuh untuk memastikan bahwa literatur benar-benar relevan dengan variabel penelitian, yaitu sistem informasi keuangan daerah, pengawasan internal, dan kualitas pengelolaan keuangan publik. Tahap keempat adalah klasifikasi literatur berdasarkan jenis sumber, yaitu artikel ilmiah, buku, regulasi, laporan pemerintah, dan dokumen resmi daerah. Tahap terakhir adalah sintesis literatur, yaitu menghubungkan temuan penelitian sebelumnya dengan konteks penerapan SIKSDA dan pengawasan internal di Kabupaten Sidoarjo.

Jumlah literatur yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 30 sumber utama. Literatur tersebut meliputi 15 artikel jurnal ilmiah, 3 buku atau referensi konseptual, 5 peraturan perundang-undangan, 4 laporan atau dokumen resmi pemerintah daerah, serta 3 sumber resmi dari website pemerintah dan lembaga negara. Artikel jurnal digunakan untuk memperkuat landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan peraturan perundang-undangan digunakan untuk memahami dasar hukum pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal. Laporan pemerintah daerah dan dokumen resmi digunakan untuk mengkaji kondisi empiris pengelolaan keuangan Kabupaten Sidoarjo pada periode 2021–2022.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi terhadap penerapan sistem informasi keuangan daerah dalam proses pengelolaan keuangan publik. Observasi dilakukan secara nonpartisipatif untuk memperoleh gambaran mengenai penggunaan SIKSDA dalam mendukung kegiatan administrasi keuangan, pemantauan anggaran, dan penyusunan laporan keuangan. Adapun data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang relevan, seperti laporan keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021–2022, laporan kinerja instansi pemerintah, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, serta referensi konseptual yang mendukung penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, observasi, dan analisis dokumen. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem informasi keuangan daerah, pengawasan internal, serta kualitas pengelolaan keuangan publik. Observasi digunakan untuk memahami penerapan sistem secara langsung dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, analisis dokumen dilakukan dengan menelaah laporan keuangan, laporan kinerja, kebijakan, regulasi, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Kabupaten Sidoarjo pada periode 2021–2022.

Keabsahan data dalam penelitian ini diperkuat melalui teknik triangulasi data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu hasil observasi, dokumen resmi pemerintah, laporan keuangan daerah, laporan kinerja instansi, regulasi, serta hasil penelitian terdahulu. Triangulasi sumber digunakan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh tidak hanya berasal dari satu jenis data, tetapi didukung oleh beberapa sumber yang saling melengkapi. Selain itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil studi literatur, observasi, dan analisis dokumen. Dengan teknik ini, temuan penelitian diharapkan memiliki tingkat keandalan yang lebih baik karena didasarkan pada proses pengecekan silang antar sumber dan antar teknik pengumpulan data.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Tahapan analisis dilakukan melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, menyaring, dan mengelompokkan data yang sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif untuk menjelaskan hubungan antara penerapan SIKSDA, pengawasan internal, dan kualitas pengelolaan keuangan publik. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan hasil temuan penelitian berdasarkan teori, dokumen, regulasi, hasil observasi, dan kondisi empiris yang ditemukan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran sistem informasi keuangan daerah dan pengawasan internal dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan publik di Kabupaten Sidoarjo.

Hasil

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur, observasi, dan analisis dokumen terhadap penerapan Sistem Informasi Keuangan Sidoarjo (SIKSDA) serta pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan publik di Kabupaten Sidoarjo pada periode 2021–2022. Fokus hasil penelitian diarahkan pada realisasi APBD, ketertiban pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, aksesibilitas data, pengawasan internal, efisiensi pengelolaan anggaran, serta kendala sumber daya manusia dan teknologi. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan karena penelitian ini bertujuan menggambarkan fenomena pengelolaan keuangan daerah secara mendalam berdasarkan data, dokumen, dan kondisi empiris yang ditemukan dalam konteks pemerintahan daerah (Rosita & Rosalina, 2023).

Berdasarkan hasil analisis dokumen, implementasi SIKSDA memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari realisasi APBD Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021, anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.270.781.226.451, sedangkan realisasi mencapai Rp4.673.427.797.833 atau sebesar 109,43%. Selisih antara anggaran dan realisasi mencapai Rp402.646.571.382. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021 masih terdapat perbedaan cukup besar antara perencanaan dan realisasi anggaran.

Pada tahun 2022, kondisi pengelolaan anggaran menunjukkan perbaikan. Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.452.199.210.000, sedangkan realisasi mencapai Rp4.504.849.594.847 atau sebesar 101,18%. Selisih antara anggaran dan realisasi turun menjadi Rp52.650.384.847. Penurunan selisih tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada tahun 2022 menjadi lebih terkendali dan lebih mendekati perencanaan yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Ringkasan realisasi APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021–2022

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Realisasi (%)
2021	4.270.781.226.451	4.673.427.797.833	402.646.571.382	109,43
2022	4.452.199.210.000	4.504.849.594.847	52.650.384.847	101,18

Berdasarkan Tabel 1, terjadi penurunan selisih realisasi anggaran yang cukup besar dari tahun 2021 ke tahun 2022. Pada tahun 2021, realisasi anggaran melebihi anggaran yang ditetapkan dengan persentase 109,43%, sedangkan pada tahun 2022 realisasi anggaran menjadi lebih terkendali dengan persentase 101,18%. Semakin kecil selisih antara anggaran dan realisasi menunjukkan semakin baiknya kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan anggaran yang realistis serta melaksanakan anggaran sesuai kebutuhan.

Untuk memperkuat keabsahan hasil penelitian, data dianalisis melalui teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil analisis dokumen, hasil observasi terhadap penerapan SIKSDA, serta temuan dari literatur terdahulu. Teknik ini digunakan agar temuan penelitian tidak hanya bersumber dari satu jenis data, tetapi diperkuat oleh beberapa sumber yang saling mendukung.

Tabel 2. Triangulasi data hasil penelitian

Fokus Temuan	Hasil Analisis Dokumen	Hasil Observasi	Dukungan Literatur	Interpretasi
Realisasi APBD	Selisih realisasi anggaran menurun dari Rp402.646.571.382 pada tahun 2021 menjadi	SIKSDA membantu proses pemantauan dan rekapitulasi data	Sistem informasi keuangan daerah membantu pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan secara lebih	Penerapan SIKSDA berkontribusi terhadap peningkatan ketepatan pengelolaan anggaran.

Fokus Temuan	Hasil Analisis Dokumen	Hasil Observasi	Dukungan Literatur	Interpretasi
	Rp52.650.384.847 pada tahun 2022.	anggaran secara lebih tertib.	terstruktur (Fitriani, 2025).	
Ketertiban pencatatan transaksi	Pada tahun 2021 masih terdapat selisih signifikan, sedangkan tahun 2022 pencatatan lebih terkendali.	Transaksi keuangan lebih mudah ditelusuri karena data tersimpan dalam sistem digital.	Sistem informasi akuntansi keuangan daerah dapat meningkatkan kualitas data keuangan (Putri & Sundari, 2025).	Digitalisasi pencatatan membantu mengurangi potensi kesalahan administrasi.
Penyusunan laporan keuangan	Laporan keuangan tahun 2022 lebih sistematis dan mendukung proses pertanggungjawaban.	Rekapitulasi data menjadi lebih cepat karena data tersimpan dalam sistem.	Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh keandalan sistem dan data yang mudah diverifikasi (Rizki et al., 2025).	SIKSDA mendukung penyusunan laporan yang lebih cepat, rapi, dan akuntabel.
Aksesibilitas data	Data keuangan tahun 2022 lebih mudah ditelusuri dibandingkan tahun 2021.	Akses data lebih terbuka bagi pihak yang berkepentingan dalam proses evaluasi dan pengawasan.	Aksesibilitas informasi keuangan mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Rosita & Rosalina, 2023).	Sistem informasi meningkatkan transparansi dan kemudahan pemantauan data.
Pengawasan internal	Proses audit dan pengendalian internal semakin didukung oleh data yang lebih lengkap.	Pengawas lebih mudah melakukan pelacakan transaksi dan pemeriksaan dokumen.	SPIP dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Heinrich & Probohudono, 2023).	Pengawasan internal menjadi lebih efektif ketika didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi.
Kendala SDM	BPKAD mengidentifikasi masih adanya keterbatasan pemahaman penganggaran dan penatausahaan pada perangkat daerah.	Beberapa operator masih membutuhkan pelatihan lanjutan dalam penggunaan sistem.	Kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan dan laporan keuangan (Winarni et al., 2020).	Kualitas SDM menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan SIKSDA.
Kendala teknologi	Pada tahun 2021 sistem belum sepenuhnya terintegrasi, sedangkan tahun 2022 menunjukkan perbaikan.	Infrastruktur dan integrasi sistem masih perlu diperkuat agar proses pengelolaan data lebih optimal.	Pemanfaatan teknologi informasi perlu didukung sistem terintegrasi dan pengendalian internal yang memadai (Rizki et al., 2025).	Penguatan infrastruktur teknologi masih diperlukan untuk menjaga keberlanjutan sistem.

Berdasarkan Tabel 2, hasil triangulasi menunjukkan bahwa penerapan SIKSDA memiliki peran dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo. Temuan dari dokumen APBD menunjukkan adanya perbaikan dari sisi selisih realisasi anggaran. Hasil observasi menunjukkan bahwa penggunaan sistem digital membantu pencatatan dan pelacakan transaksi. Sementara itu, literatur terdahulu memperkuat bahwa sistem informasi keuangan daerah berperan penting dalam meningkatkan ketertiban pencatatan, kualitas laporan keuangan, transparansi, dan akuntabilitas.

Dari aspek pencatatan transaksi keuangan, hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan ketertiban pencatatan pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada

tahun 2021, pencatatan transaksi sudah berjalan cukup baik, tetapi masih terdapat selisih data yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pencatatan belum sepenuhnya berjalan optimal, terutama apabila masih terdapat proses manual atau sistem yang belum terintegrasi secara penuh. Pada tahun 2022, optimalisasi penggunaan SIKSDA membuat pencatatan transaksi menjadi lebih tertib, sistematis, dan terstruktur. Setiap transaksi keuangan dapat dicatat secara digital, tersimpan dalam sistem, serta lebih mudah ditelusuri apabila diperlukan dalam proses pemeriksaan atau evaluasi.

Dari segi penyusunan laporan keuangan, SIKSDA juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kecepatan dan kualitas pelaporan. Pada tahun 2021, laporan keuangan telah disusun cukup tepat waktu, tetapi masih terdapat kendala dalam konsistensi dan sistematika penyajian data. Pada tahun 2022, laporan keuangan disusun dengan lebih rapi, sistematis, dan tepat waktu. Peningkatan ini terjadi karena data keuangan telah terdigitalisasi sehingga proses pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian laporan dapat dilakukan dengan lebih cepat.

Tabel 3. *Perbandingan kinerja pengelolaan keuangan daerah tahun 2021–2022*

Indikator	2021	2022	Tren
Ketertiban pencatatan transaksi	Pencatatan cukup tertib, namun terdapat selisih signifikan	Pencatatan lebih tertib dan sesuai standar	Meningkat
Kecepatan penyusunan laporan	Penyusunan laporan cukup tepat waktu	Penyusunan laporan lebih sistematis dan tepat waktu	Meningkat
Aksesibilitas data keuangan	Akses data masih terbatas	Akses data lebih terbuka dan terdigitalisasi	Meningkat
Dukungan proses audit	Proses audit berjalan baik, tetapi masih membutuhkan penguatan data	Pengendalian internal semakin kuat karena data lebih lengkap	Meningkat
Efisiensi pengelolaan anggaran	Selisih anggaran cukup besar	Selisih lebih terkendali	Meningkat
Kendala SDM	Masih terdapat keterbatasan pada operator dan perangkat daerah	Kapasitas SDM mulai meningkat, tetapi masih perlu pelatihan lanjutan	Perlu penguatan
Kendala teknologi	Sistem belum sepenuhnya terintegrasi	Sistem lebih baik dan lebih terintegrasi	Perlu penguatan

Berdasarkan Tabel 3, seluruh indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Peningkatan tersebut terlihat pada aspek pencatatan transaksi, penyusunan laporan, aksesibilitas data, dukungan terhadap audit, dan efisiensi pengelolaan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan SIKSDA tidak hanya berdampak pada aspek teknis administrasi, tetapi juga mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Dari aspek transparansi dan aksesibilitas data, penerapan SIKSDA mempermudah akses terhadap informasi keuangan. Pada tahun 2021, akses terhadap data keuangan masih terbatas karena sebagian data belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem digital. Kondisi ini dapat menyulitkan proses pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Pada tahun 2022, data keuangan menjadi lebih mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan karena telah terdigitalisasi dan tersusun secara lebih sistematis. Dengan sistem informasi yang baik, setiap transaksi dan penggunaan anggaran dapat ditelusuri secara lebih jelas sehingga memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah.

Selanjutnya, dari aspek pengawasan internal, hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara SIKSDA dan mekanisme pengawasan keuangan memberikan dampak positif terhadap proses audit dan pengendalian internal. Pada tahun 2021, proses audit telah berjalan dengan

baik, tetapi masih terkendala oleh keterbatasan data yang belum sepenuhnya terintegrasi. Hal ini dapat menyebabkan proses pemeriksaan membutuhkan waktu lebih lama karena data harus dikumpulkan dari berbagai sumber. Pada tahun 2022, ketersediaan data menjadi lebih lengkap dan terorganisasi sehingga mempermudah pelaksanaan audit.

Tabel 4. *Pengawasan keuangan daerah tahun 2021–2022*

Aspek Pengawasan	2021	2022	Implikasi
Ketepatan pencatatan	Selisih anggaran relatif besar	Selisih lebih terkendali	Peningkatan akuntabilitas
Kesesuaian dengan prosedur	Sebagian besar sesuai, tetapi masih terdapat deviasi	Lebih sesuai dengan standar	Mengurangi potensi penyimpangan
Ketersediaan data untuk audit	Data tersedia, namun belum optimal	Data lebih lengkap dan terintegrasi	Mempermudah audit
Kendala SDM	Keterbatasan pada beberapa operator	Kapasitas meningkat	Perlu pelatihan lanjutan
Kendala teknologi	Sistem belum sepenuhnya terintegrasi	Sistem lebih baik dan lebih terintegrasi	Perlu penguatan infrastruktur

Berdasarkan Tabel 4, pengawasan keuangan daerah mengalami perbaikan pada tahun 2022. Ketepatan pencatatan meningkat karena selisih anggaran menjadi lebih terkendali. Kesesuaian dengan prosedur juga menunjukkan perkembangan yang lebih baik karena proses pengelolaan keuangan semakin mengikuti standar yang berlaku. Selain itu, data untuk audit menjadi lebih lengkap dan terintegrasi sehingga mempermudah proses pemeriksaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan internal menjadi lebih efektif apabila didukung oleh sistem informasi keuangan yang memadai. Untuk memperjelas dasar konseptual dan empiris penelitian, berikut disajikan daftar literatur utama beserta variabel atau aspek yang dikaji.

Tabel 5. *Daftar literatur dan variabel/aspek yang diukur*

No.	Penulis/Tahun	Fokus Kajian	Variabel/Aspek yang Diukur	Relevansi dengan Penelitian
1	Rosita & Rosalina (2023)	Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Sistem informasi keuangan, akuntabilitas, laporan keuangan	Menjelaskan hubungan sistem informasi dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2	Fitriani (2025)	Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah	Sistem informasi pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan, kualitas laporan keuangan	Mendukung analisis bahwa sistem informasi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.
3	Putri & Sundari (2025)	Sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan good governance	Sistem informasi akuntansi, good governance, kualitas laporan keuangan	Digunakan untuk menjelaskan pentingnya sistem digital dalam meningkatkan kualitas data keuangan.
4	Heinrich & Probahudono (2023)	Teknologi informasi dan SPIP	Pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, kualitas laporan keuangan	Mendukung pembahasan tentang hubungan antara teknologi informasi dan pengawasan internal.
5	Rizki et al. (2025)	Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Keandalan data, sistem informasi, pengendalian internal	Digunakan untuk menjelaskan pentingnya data yang relevan, andal, dan mudah diverifikasi.
6	Winarni et al. (2020)	Good governance, SDM, SPIP, dan SIPKD	Good governance, kompetensi SDM, SPIP, pemanfaatan SIPKD, akuntabilitas publik	Mendukung pembahasan mengenai pentingnya kompetensi SDM dan pengendalian internal.
7	BPKAD Kabupaten Sidoarjo (2023)	Laporan kinerja instansi pemerintah	Isu strategis, digitalisasi, tata kelola keuangan daerah	Menjadi sumber utama untuk mengidentifikasi kondisi empiris pengelolaan keuangan Kabupaten Sidoarjo.

No.	Penulis/Tahun	Fokus Kajian	Variabel/Aspek yang Diukur	Relevansi dengan Penelitian
8	BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur (2022; 2023)	Hasil pemeriksaan LKPD Kabupaten Sidoarjo	Opini audit, kewajaran laporan keuangan, akuntabilitas	Digunakan untuk melihat capaian pengelolaan keuangan daerah melalui opini BPK.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Keuangan Sidoarjo (SIKSDA) berperan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik di Kabupaten Sidoarjo, khususnya pada aspek pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, aksesibilitas data, dan dukungan terhadap pengawasan internal. Temuan ini memperlihatkan bahwa sistem informasi keuangan daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. Dalam konteks pemerintahan daerah, penggunaan sistem informasi menjadi semakin penting karena pengelolaan keuangan publik memerlukan data yang cepat, akurat, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perbaikan pengelolaan keuangan daerah terlihat dari penurunan selisih antara anggaran dan realisasi APBD pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021, realisasi APBD mencapai 109,43%, sedangkan pada tahun 2022 menurun menjadi 101,18%. Penurunan persentase realisasi ini tidak dapat dipahami sebagai penurunan kinerja, melainkan sebagai indikasi bahwa realisasi anggaran menjadi lebih mendekati perencanaan yang telah ditetapkan. Semakin kecil selisih antara anggaran dan realisasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi penggunaan anggaran. Dengan demikian, SIKSDA dapat dipahami sebagai salah satu instrumen yang membantu pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan anggaran secara lebih sistematis.

Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa implementasi sistem informasi pemerintahan daerah berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Fitriani, 2025). Sistem informasi memungkinkan proses pencatatan dan pengolahan data dilakukan secara lebih cepat dan terstruktur (Ayem & Amahala, 2023). Dalam pengelolaan keuangan daerah, kecepatan dan ketepatan data sangat diperlukan karena setiap keputusan anggaran harus didasarkan pada informasi yang valid. Apabila data keuangan masih tersebar dalam berbagai dokumen manual, maka proses perencanaan, pengendalian, dan pelaporan berpotensi mengalami keterlambatan atau ketidaktepatan. Oleh karena itu, penggunaan SIKSDA menjadi relevan dalam mendukung efisiensi administrasi keuangan daerah.

Pada aspek pencatatan transaksi, hasil penelitian menunjukkan bahwa tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Pencatatan transaksi yang lebih tertib menunjukkan bahwa penggunaan sistem digital dapat membantu mengurangi potensi kesalahan pencatatan, duplikasi data, dan keterlambatan rekapitulasi. Dalam sistem manual, pencatatan transaksi sangat bergantung pada ketelitian operator dan kelengkapan dokumen fisik. Kondisi tersebut dapat menimbulkan risiko kesalahan apabila volume transaksi cukup besar. Melalui SIKSDA, data transaksi dapat dicatat dalam sistem, disimpan secara digital, serta ditelusuri kembali apabila dibutuhkan dalam proses evaluasi atau audit.

Peningkatan ketertiban pencatatan ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi keuangan daerah dapat meningkatkan kualitas data dan laporan keuangan pemerintah daerah

(Putri & Sundari, 2025). Kualitas data menjadi hal yang sangat penting karena laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan kumpulan transaksi yang terjadi selama satu periode anggaran (Leunupun et al., 2022). Apabila pencatatan transaksi tidak tertib, maka laporan keuangan yang dihasilkan juga berpotensi tidak akurat. Sebaliknya, apabila transaksi tercatat secara sistematis, maka proses penyusunan laporan dapat dilakukan dengan lebih baik dan lebih mudah diverifikasi.

Dari aspek penyusunan laporan keuangan, penerapan SIKSDA memberikan kontribusi terhadap peningkatan kecepatan dan kerapian penyajian data. Pada tahun 2021, laporan keuangan sudah dapat disusun, tetapi masih terdapat kendala dalam konsistensi dan sistematika data. Pada tahun 2022, proses penyusunan laporan menjadi lebih sistematis karena data telah terdigitalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi mampu memperpendek alur kerja pelaporan keuangan. Data tidak lagi harus dihimpun secara manual dari berbagai dokumen terpisah, tetapi dapat diolah melalui sistem yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, SIKSDA membantu meningkatkan efisiensi proses pelaporan.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh keandalan data, kelengkapan dokumen, serta kemampuan sistem dalam menyajikan informasi secara tepat waktu. Kualitas laporan keuangan berhubungan dengan kemampuan sistem menyediakan data yang relevan, andal, dan mudah diverifikasi (Rizki et al., 2025). Dalam konteks Kabupaten Sidoarjo, penggunaan SIKSDA membantu memperkuat aspek tersebut karena data keuangan menjadi lebih terdokumentasi dan dapat ditelusuri. Hal ini penting karena laporan keuangan daerah tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dan lembaga pemeriksa.

Dari aspek transparansi, SIKSDA memberikan kontribusi terhadap peningkatan aksesibilitas data keuangan. Pada tahun 2021, akses data masih terbatas karena sebagian data belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem digital. Kondisi ini dapat membatasi kemampuan pihak pengawas atau pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi secara cepat. Pada tahun 2022, data keuangan menjadi lebih mudah diakses karena telah tersusun secara lebih sistematis dalam sistem digital. Aksesibilitas data menjadi salah satu unsur penting dalam tata kelola keuangan publik karena informasi keuangan yang mudah ditelusuri dapat meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan publik.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik tidak hanya berarti bahwa pemerintah menyediakan informasi, tetapi juga bahwa informasi tersebut dapat dipahami, ditelusuri, dan digunakan sebagai dasar evaluasi. Dengan sistem informasi yang baik, penggunaan anggaran dapat dipantau secara lebih jelas. Hal ini memperkuat posisi SIKSDA sebagai instrumen pendukung transparansi keuangan daerah. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berperan dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan karena data keuangan dapat dikelola secara lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan (Rosita & Rosalina, 2023).

Selain sistem informasi, pengawasan internal juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal di Kabupaten Sidoarjo menjadi lebih efektif ketika didukung oleh data yang tersedia dalam SIKSDA. Pada tahun 2021, proses audit telah berjalan, tetapi masih terdapat keterbatasan karena data belum sepenuhnya terintegrasi. Pada tahun 2022, ketersediaan data yang lebih lengkap dan terorganisasi membantu mempermudah proses pemeriksaan. Dengan demikian, sistem informasi dan pengawasan internal memiliki hubungan yang saling melengkapi.

Pengawasan internal berfungsi untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan, prosedur, dan tujuan organisasi. Sistem informasi menyediakan data yang dibutuhkan untuk proses pengawasan, sedangkan pengawasan internal memastikan bahwa data dan transaksi yang tercatat dalam sistem sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanpa dukungan sistem informasi, pengawasan internal dapat mengalami keterbatasan karena proses pemeriksaan membutuhkan data yang lengkap dan cepat. Sebaliknya, tanpa pengawasan internal, sistem informasi hanya berfungsi sebagai alat pencatatan administratif tanpa jaminan bahwa proses keuangan telah berjalan sesuai prosedur.

SPIP dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Heinrich & Probohudono, 2023). Sistem pengendalian internal dapat membantu mencegah kesalahan, meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur, serta memperkuat keandalan pelaporan. Dalam konteks Kabupaten Sidoarjo, pengawasan internal yang didukung oleh SIKSDA dapat mempercepat proses audit karena data transaksi lebih mudah ditelusuri. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan internal sangat dipengaruhi oleh kualitas data dan ketersediaan sistem informasi yang memadai.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan SIKSDA masih menghadapi kendala, terutama pada aspek sumber daya manusia dan teknologi. Kendala sumber daya manusia terlihat dari masih adanya kebutuhan peningkatan kompetensi operator dan perangkat daerah dalam memahami penganggaran, penata usahaan, dan penggunaan sistem. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan aplikasi, tetapi juga oleh kemampuan pengguna dalam mengoperasikan dan memanfaatkan sistem tersebut (Yulianda et al., 2022). Sistem yang baik tidak akan menghasilkan pengelolaan keuangan yang optimal apabila pengguna belum memiliki keterampilan yang memadai.

Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas publik dan kualitas laporan keuangan (Winarni et al., 2020). Dalam pengelolaan keuangan daerah, pegawai atau operator sistem harus memahami alur kerja keuangan, regulasi, prosedur pencatatan, serta penggunaan aplikasi. Apabila pemahaman tersebut belum merata, maka proses input data, validasi, dan pelaporan dapat mengalami hambatan. Oleh karena itu, pelatihan lanjutan bagi operator dan perangkat daerah menjadi kebutuhan penting agar SIKSDA dapat digunakan secara optimal.

Selain kendala sumber daya manusia, aspek teknologi juga masih perlu diperkuat. Pada tahun 2021, sistem belum sepenuhnya terintegrasi sehingga masih terdapat hambatan dalam pengelolaan data keuangan. Pada tahun 2022, sistem menunjukkan perbaikan, tetapi penguatan infrastruktur tetap diperlukan agar sistem dapat berjalan lebih stabil, aman, dan responsif terhadap kebutuhan pengelolaan keuangan daerah. Infrastruktur teknologi yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa sistem dapat digunakan secara berkelanjutan, terutama ketika volume data dan kompleksitas pengelolaan keuangan semakin meningkat.

Secara keseluruhan, SIKSDA memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik di Kabupaten Sidoarjo. Peran tersebut terlihat pada tiga aspek utama. Pertama, SIKSDA mendukung efisiensi administrasi karena proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data dapat dilakukan secara lebih cepat. Kedua, SIKSDA memperkuat transparansi dan akuntabilitas karena data keuangan lebih mudah ditelusuri dan diverifikasi. Ketiga, SIKSDA mendukung pengawasan internal karena menyediakan data yang lebih lengkap dan terstruktur untuk proses audit dan evaluasi.

Dengan demikian, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan publik tidak hanya bergantung pada keberadaan sistem informasi, tetapi juga pada integrasi antara sistem, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme pengawasan internal. SIKSDA dapat menjadi instrumen penting dalam reformasi tata kelola keuangan daerah apabila didukung oleh pelatihan SDM, penguatan infrastruktur teknologi, integrasi sistem antar basis data, serta pengawasan internal yang konsisten. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu terus mengoptimalkan penggunaan SIKSDA agar pengelolaan keuangan daerah menjadi semakin transparan, akuntabel, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian periode 2021–2022, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi Keuangan Sidoarjo (SIKSDA) dan pengawasan internal berperan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIKSDA membantu proses pencatatan transaksi menjadi lebih tertib, terstruktur, dan mudah ditelusuri. Selain itu, sistem ini juga mendukung percepatan penyusunan laporan keuangan, peningkatan aksesibilitas data, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menjawab tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem informasi keuangan daerah dan pengawasan internal berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik.

Integrasi antara SIKSDA dan pengawasan internal juga memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah, terutama dalam memperkuat proses pemantauan anggaran, mempermudah audit, mengurangi potensi kesalahan administrasi, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada periode 2021–2022 dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi literatur, observasi, dan analisis dokumen, sehingga belum mengukur pengaruh SIKSDA secara kuantitatif terhadap kinerja keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran dengan melibatkan responden dari pengelola keuangan daerah, auditor internal, dan pengguna SIKSDA agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

- Aini, E. N., Zuliasari, W., Fanida, E. H., & Hidayat, M. F. (2026). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo dalam Upaya Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah. *Journal Social Society*, 6(3), 1654–1666.
<https://doi.org/10.54065/jss.6.3.2026.1327>
- Ashara, S. N., & Hidayat, M. T. (2025). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, pengendalian intern, dan sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas pengelolaan anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(2), 1488–1502.
<https://doi.org/10.56799/peshum.v4i2.7397>
- Astuti, H. P., Ilham, M., & Madjid, U. (2024). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di BPKAD

- Pemerintah Kota Tanjungpinang. *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP): Journal of Government, Social and Politics*, 10(1). [https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10\(1\).17119](https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(1).17119)
- Ayem, S., & Amahala, R. (2023). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, sistem informasi akuntansi dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan: Studi kasus pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 12(1), 90–102. <https://doi.org/10.22437/jmk.v12i01.17228>
- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur. (2022). LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – Wajar Tanpa Pengecualian. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur. https://bpkad.sidoarjokab.go.id/web/wp-content/uploads/2023/03/BPKAD_LKjIP-Tahun-2022-1.pdf
- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur. (2023). LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 – Wajar Tanpa Pengecualian. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur. <https://jatim.bpk.go.id/hasil-pemeriksaan/lhp-lkpd/lkpd-kabupaten-sidoarjo-tahun-2022-wt>
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo. (2023). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. https://bpkad.sidoarjokab.go.id/web/wp-content/uploads/2023/03/BPKAD_LKjIP-Tahun-2022-1.pdf
- Dewi, I. D. (2022). Effectiveness of village funds for economic development and infrastructure of Bonto Jai Village, Bissappu District in Bantaeng Regency. *Income Journal of Economics Development*, 1(1), 18–33. <https://doi.org/10.54065/ijed.1.1.2021.28>
- Fitriani, L., & Solikhin, A. (2025). Pengaruh implementasi sistem informasi pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dimoderasi oleh teknologi informasi. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 13(05), 1548–1561. <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i05.32328>
- Fitriasari, D. (2024). Pengaruh penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Bandung. *Jurnal Bina Akuntansi*. <https://doi.org/10.52859/jba.v11i2.649>
- Gaol, L. L., Santoso, E. B., & Prasetyo, A. (2024). Penguatan tata kelola keuangan publik melalui partisipasi masyarakat dan transparansi informasi. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 4(1), 126–140. <https://doi.org/10.31933/mwca7592>
- Heinrich, A., & Probohudono, A. N. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah: Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Kaimana. *KONSTELASI: Konvergensi Teknologi dan Sistem Informasi*, 3(2). <https://doi.org/10.24002/konstelasi.v3i2.7150>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020>

- Leunupun, P., Persulesy, G., & Souhuwat, M. Y. (2022). Pengelolaan keuangan, sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2364–2476. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.884>
- Lotu, M. N., & Talan, G. Y. M. (2022). Pengaruh penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Setda Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 10(2), 151–161. <https://doi.org/10.35508/jak.v10i2.8719>
- Marsuni, N. S., & Kamal, N. A. A. (2024). Optimizing regional original income: A comprehensive analysis and assessment of revenue management practices in Pangkajene Regency and Islands. *Income Journal of Economics Development*, 4(1), 20–24. <https://doi.org/10.54065/ijed.4.1.2024.206>
- Nasir, N., Monoarfa, R., & Husain, S. P. (2025). Pengaruh teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jambura Accounting Review*, 6(1), 411–425. <https://doi.org/10.37905/jar.v6i1.180>
- Nugroho, R., Wahyono, C., Huraq, F., & Muhammad, A. S. (2023). Analisis pelaksanaan dan penatausahaan keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan teori governabilitas dan governmentalitas. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 7(2), 122–133. <https://doi.org/10.47431/jirreg.v7i2.365>
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (n.d.). *Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo*. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. <https://siksda.sidoarjokab.go.id>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sekretariat Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4876/pp-no-60-tahun-2008>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/details/103888/pp-no-12-tahun-2019>
- Pratolo, S., & Jatmiko, B. (2022). The influence of transparency and accountability on local government financial management. *Journal of Accounting and Investment*, 23(2), 318–333. <https://doi.org/10.18196/jai.v23i2.14617>
- Putri, E. Y., & Sundari, S. (2025). Studi kuantitatif pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan good governance terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 6(2), 299–314. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v6i2.2732>
- Rahma, A. A., Fanida, E. H., & Fitrie, R. A. (2026). Evaluasi Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020-2025. *Journal Social Society*, 6(2), 1404–1415. <https://doi.org/10.54065/jss.6.2.2026.1281>
- Ramadania, S., & Kamal, N. A. A. (2024). Understanding the effectiveness of village fund allocation management: A study in Sinjai Regency. *Income Journal of Economics Development*, 4(1), 30–35. <https://doi.org/10.54065/ijed.4.1.2024.208>
- Ridzal, N. A., Sujana, I. W., & Malik, E. (2022). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3094–3104. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.882>

- Rizki, M. F. J., Wahyudi, I., & Olimsar, F. (2025). Pengaruh sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah: Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 13(05), 1723–1737. <https://doi.org/10.24002/konstelasi.v3i2.7150>
- Rosita, E. N., & Rosalina, R. R. (2023). Pengaruh penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. *OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 8(1). <https://doi.org/10.23969/oikos.v8i1.12337>
- Sofyani, H., Riyadh, H. A., & Fahlevi, H. (2023). Transparency and accountability in local government financial management: Evidence from Indonesia. *Public and Municipal Finance*, 12(1), 39–49. [https://doi.org/10.21511/pmf.12\(1\).2023.04](https://doi.org/10.21511/pmf.12(1).2023.04)
- Theana, V., Ardini, L., & Mildawati, T. (2025). Pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah: Peran moderasi teknologi informasi. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 9(2), 319–341. <https://doi.org/10.18196/rabin.v9i2.26198>
- Winarni, E., Kurniasih, E. T., & Soleh, A. (2020). Dampak penerapan good governance, kompetensi SDM, penerapan SAP, penerapan SPIP dan pemanfaatan SIPKD terhadap akuntabilitas publik dan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Jambi. *J-MAS: Jurnal Manajemen dan Sains*, 5(2), 289–295. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v6i2.2732>
- Yulianda, D., Lubis, N. K., & Azhar, I. (2022). Pengaruh kompetensi pengguna, teknologi informasi dan implementasi SIPD terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2), 794–804. <https://doi.org/10.36987/ebma.v3i2.3579>